

## ANALISIS DAMPAK APLIKASI TEKNOLOGI SIKLUS BARANG DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS KECAMATAN SELAAWI)

Muhammad Haikal Hayatul Fazri<sup>1</sup>, Lina Yulianti<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia <sup>1,2</sup>

Email: [mhmdhaikalq@gmail.com](mailto:mhmdhaikalq@gmail.com)<sup>1</sup>, [lina.yulianti@uinsgd.ac.id](mailto:lina.yulianti@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the application of technology applications in the management cycle of Regional Assets (BMD) and its impact on improving supervision and accountability in Selaawi District, Garut Regency. The study uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the phenomenon of system implementation in a factual and in-depth manner. The results show that the use of the ATISISBADA application can improve the effectiveness of supervision through real-time asset data recording, integration between management cycles, and the provision of an audit trail that strengthens the internal control system. Reporting transparency also increases because asset data is centralized and automatically compiled in accordance with applicable accounting standards and regulations. However, the effectiveness of the application is still influenced by limited human resource competency and technical system constraints. Therefore, policies are needed to strengthen human resource capacity and continuous system updates so that this technology application can support the realization of accountable, efficient, and transparent regional asset management according to the principles of Good Governance.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>Regional Property, ATISISBADA, accountability, supervision, information technology.</i></p>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi teknologi dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta dampaknya terhadap peningkatan pengawasan dan akuntabilitas di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena penerapan sistem secara faktual dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ATISISBADA mampu meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pencatatan data aset secara real-time, integrasi antar-siklus pengelolaan, serta penyediaan audit trail yang memperkuat sistem pengendalian internal. Transparansi pelaporan juga meningkat karena data aset terpusat dan otomatis tersusun sesuai standar akuntansi serta regulasi yang berlaku. Namun, efektivitas penerapan aplikasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan kendala teknis sistem. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penguatan kapasitas SDM dan pembaruan sistem secara berkelanjutan agar aplikasi teknologi ini dapat mendukung terwujudnya tata kelola barang milik daerah yang akuntabel, efisien, dan transparan sesuai prinsip Good Governance.

**Kata Kunci:** *Barang Milik Daerah, ATISISBADA, akuntabilitas, pengawasan, teknologi informasi.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang dirancang secara sadar, terukur, dan dijalankan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan di bidang tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (A. Ramdhani & Ramdhani, 2017). Agar memberikan hasil yang optimal, kebijakan publik perlu diimplementasikan secara efektif. Implementasi sendiri merupakan proses pelaksanaan kebijakan agar dapat mencapai sasaran, menyelesaikan permasalahan masyarakat yang telah diakomodasi dalam kebijakan tersebut, serta memberikan dampak positif bagi publik (Ieke Sartika Iriany et al., 2020; Kania, 2021).

Hal yang sama berlaku pada kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Kebijakan di bidang ini harus sejalan dengan aspirasi masyarakat serta mendukung tujuan negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi pemanfaatan aset oleh pihak-pihak yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, ketidakjelasan status hukum aset, serta praktik tukar-menukar aset negara yang merugikan negara. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan standar profesional yang sesuai dalam pengelolaan aset tersebut.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara mandiri dan terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Kegiatan penatausahaan barang milik daerah menjadi bagian integral dari pengelolaan tersebut karena berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), baik dari sisi administrasi, fisik, maupun hukum (Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2016).

Selain itu, pengelolaan BMD juga merupakan bagian dari sistem yang terhubung dengan sistem informasi manajemen (Afriady & Pangestu, 2021). Barang milik daerah sendiri memiliki peran yang sangat vital bagi pemerintah daerah karena menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung kelancaran operasional dan pelaksanaan fungsi pemerintahan (Rachmawati et al., 2018).

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Garut masih lemah. Hal ini yang menyebabkan masih banyaknya pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (Hidayati, 2016). Beberapa kasus terjadi pada daerah yang bahkan mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) yang disebabkan ketidakmampuan mewujudkan

tata kelola aset/ barang pemerintah daerah secara baik (Ferdianus, 2013; A. Ramdhani, Alamanda, et al., 2018).

Agar proses konsolidasi data barang milik daerah dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terstruktur, diperlukan sebuah sistem manajemen yang mampu mengelola data tersebut secara terpadu (Nursasona, 2017; A. Ramdhani et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Bupati Garut, pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan aset, telah memanfaatkan aplikasi bernama **ATISISBADA**. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pengklasifikasian barang milik daerah secara sistematis.

Penerapan aplikasi teknologi seperti **sistem manajemen barang milik daerah berbasis digital** diharapkan dapat memudahkan proses pencatatan, pelaporan, serta pengawasan aset agar lebih akurat dan terintegrasi. Dengan sistem berbasis teknologi, pemerintah daerah dapat meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi, kehilangan data, maupun penyalahgunaan aset. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta aset daerah.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Kecamatan Selaawi masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mampu mencapai opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI atas laporan keuangannya. Salah satu penyebab utamanya adalah pemanfaatan sistem ATISISBADA yang belum berjalan secara optimal. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, minimnya alokasi anggaran, serta masalah jaringan internet yang belum memadai.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa mayoritas pegawai yang bertugas dalam penatausahaan barang milik daerah memiliki latar belakang pendidikan pada tingkat SMA/ sederajat dan Sarjana (S1). Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi **Pemerintah Kecamatan Selaawi** agar dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan pegawai, terutama dalam pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara optimal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** dengan pendekatan **deskriptif**. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam

bagaimana penerapan aplikasi teknologi dalam siklus barang milik daerah dapat berdampak terhadap peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di **Kecamatan Selaawi**. (Sugiyono, 2016).

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual tanpa melakukan pengujian statistik. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi aplikasi teknologi pada siklus barang milik daerah serta dampaknya terhadap efektivitas pengawasan dan tingkat akuntabilitas aparatur pengelola aset daerah.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi aplikasi teknologi informasi dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memberikan dampak signifikan dan positif terhadap peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan BMD. Peningkatan pengawasan melalui akurasi data *real-time* memungkinkan pencatatan data aset secara terintegrasi dan *real-time*. ATISISBADA merupakan *software* yang didalamnya memuat 13 Siklus yang diterapkan dalam pengadministrasian data barang milik daerah, yang terdiri dari Siklus Perencanaan, Siklus Pengadaan, Siklus Penerimaan dan Pengeluaran, Siklus Penepatan, Siklus Penatausahaan, Siklus Pemanfaatan, Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan, Siklus Penilaian, Siklus Penghapusan, Siklus Pemindahtanganan, Siklus Pembiayaan, Siklus Ganti Rugi dan Siklus Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, yang terintegrasi dengan satu sistem sehingga memungkinkan pengawasan dapat dilakukan dengan akurasi data *real-time* dimana semua pengadministrasian tersaji dalam satu aplikasi. Menggantikan pencatatan manual yang rawan *human error*. Hal ini memudahkan pengawas untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi aset saat ini.

Audit Trail yang Kuat: Sistem menyediakan jejak audit (*audit trail*) yang merekam setiap aktivitas terkait aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan. Ini memperkuat *internal control system* dan mempermudah pengawasan aktif. Sehingga dapat mempermudah pemantauan Pihak yang berwenang dapat **memantau seluruh siklus aset** dari perencanaan hingga penghapusan dalam satu platform terintegrasi sehingga dapat meningkatkan pengawasan pengelolaan barang daerah.

Transparansi Pelaporan Teknologi informasi meningkatkan transparansi melalui kemudahan akses data aset yang relevan bagi pemangku kepentingan, termasuk auditor, regulator, dan masyarakat umum, Sistem mematuhi **standar akuntansi dan regulasi BMD nasional**, memastikan bahwa setiap aset dicatat menggunakan kode dan terminologi yang sama di seluruh unit kerja. Hal ini menghilangkan *grey area* interpretasi data yang sering menjadi celah untuk ketidakakuratan atau ketidakjujuran. Semua data aset disimpan dalam satu basis data terpusat. Ini memudahkan pengawas dan auditor untuk mengakses data yang **konsisten dan tidak dimanipulasi** tanpa harus mengumpulkan berkas fisik dari berbagai OPD. Ketersediaan data yang terpusat ini merupakan wujud nyata dari pemenuhan prinsip **transparansi data** sebagai pilar *Good Governance*. Meskipun data operasional dan rahasia tetap terbatas, data rekapitulasi aset dan laporan ringkas dapat diintegrasikan dengan portal publik. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap **keterbukaan informasi**, yang pada gilirannya **meningkatkan kepercayaan publik**

Sistem mempersonalisasi tanggung jawab dengan menetapkan peran (*role-based access control*) dan merekam setiap tindakan pengguna. Aplikasi membedakan dan membatasi hak akses setiap pengguna (misalnya, Pengurus Barang Pembantu, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang). Ini berarti setiap *input* atau persetujuan hanya dapat dilakukan oleh **otoritas yang berwenang**. Misalnya, hanya Pejabat Pengadaan yang dapat meng-*input* data pengadaan baru, dan hanya Pengelola Barang yang dapat menyetujui penghapusan. direkam secara permanen dalam sistem (*log file*) dengan cap waktu dan identitas pengguna (*username*). Rekaman ini berfungsi sebagai **jejak rekam hukum** yang tidak dapat dibantah. Hal ini memperkuat **pertanggungjawaban individu** karena setiap tindakan memiliki "pemilik" dan dapat ditelusuri jika terjadi penyimpangan. Sebagian besar tindakan kritis (misalnya, pemindahtanganan aset) memerlukan **persetujuan elektronik berjenjang**. Sistem tidak akan memproses tindakan tersebut sebelum semua tingkat otorisasi yang diwajibkan telah ditandatangani secara digital. Ini memastikan bahwa keputusan penting diambil secara **kolektif dan terdokumentasi**.

Aplikasi secara otomatis memproduksi laporan yang dijamin akurat dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga meningkatkan akuntabilitas pelaporan. Aplikasi dirancang untuk menghasilkan laporan sesuai format baku yang ditetapkan oleh regulasi (misalnya, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan/CALK, Laporan Barang Pengguna/Pengelola). Otomatisasi ini menghilangkan risiko kesalahan kompilasi dan perhitungan yang umum terjadi pada proses manual. Aplikasi Pengelolaan Barang Milik

Daerah terintegrasi atau setidaknya dapat berinteraksi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Data aset yang telah diverifikasi dalam Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah secara otomatis **di-posting atau ditransfer** untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Kualitas data aset yang lebih baik dan cepat secara langsung berkontribusi pada **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK. Dengan proses pelaporan yang otomatis, ketergantungan pada intervensi manual diminimalisir. Ini berarti akuntabilitas laporan lebih pada **akurasi sistem dan kepatuhan prosedur** daripada keahlian atau integritas individu pembuat laporan. Secara keseluruhan, aplikasi teknologi siklus barang daerah menciptakan **sistem akuntabilitas berbasis data yang kokoh**, di mana tanggung jawab individu dilacak, dan hasil pelaporan dijamin mutunya sesuai standar regulasi.

#### **MEKANISME PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Peningkatan pengawasan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dicapai melalui transformasi data aset dari manual menjadi digital dan terintegrasi, yang mengubah sifat pengawasan dari reaktif menjadi proaktif. Integrasi data merupakan fondasi utama, di mana aplikasi teknologi menghubungkan seluruh mata rantai siklus barang—mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) dan register, hingga pelaporan dan penghapusan—dalam satu platform terpusat. Dengan demikian, data menjadi lebih utuh, konsisten, dan mudah diakses, serta mampu memberikan pandangan tunggal (*single source of truth*) mengenai seluruh kekayaan daerah, menghilangkan fragmentasi data antar unit kerja dan mengurangi risiko duplikasi pencatatan. Di sisi lain, sistem ini meningkatkan validitas dan verifikasi data secara signifikan. Data *real-time* yang terekam memungkinkan auditor dan pengawas internal untuk melakukan verifikasi silang (*cross-check*) yang cepat dan akurat antara catatan digital dengan kondisi fisik aset di lapangan (terutama jika didukung teknologi *geo-tagging* atau *barcode*), sehingga secara efektif mengurangi risiko aset hilang (*missing asset*) atau pencatatan aset fiktif. Lebih lanjut, mekanisme pengawasan didukung oleh adanya Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang canggih. Aplikasi dapat diprogram untuk secara otomatis mengidentifikasi dan memberikan notifikasi terhadap kondisi-kondisi yang memerlukan perhatian segera, seperti aset yang terdeteksi *idle* (tidak digunakan dalam periode waktu tertentu), aset yang mendekati jadwal pemeliharaan wajib, atau adanya *asset discrepancy* (kesenjangan) antara



data perencanaan dan realisasi. Fitur proaktif ini memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan intervensi korektif sebelum masalah menjadi kerugian daerah yang signifikan.

Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dihele oleh karakteristik inheren sistem informasi, yaitu **transparansi data dan jejak rekam transaksi yang wajib (*mandatory audit trail*)**. Aspek pertama, **Transparansi dan *Good Governance***, dipenuhi melalui ketersediaan data aset yang terpusat dan terstandarisasi secara digital, yang secara efektif menghilangkan ambiguitas dan inkonsistensi. Data yang konsisten, mudah diakses, dan siap diaudit oleh pihak eksternal (auditor BPK/BPKP) merupakan manifestasi langsung dari prinsip keterbukaan. Keterbukaan ini tidak hanya mempermudah pengawasan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan aset daerah, yang merupakan pilar fundamental *Good Governance*. Pilar kedua, **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, diperkuat melalui implementasi modul peran pengguna (*role-based access control*) dan pencatatan jejak audit (*audit trail*) yang ketat. Sistem secara tegas menetapkan siapa yang berwenang melakukan *input*, perubahan, atau persetujuan untuk setiap tahapan siklus aset. Setiap entri, modifikasi, atau persetujuan dicatat secara permanen dengan identitas pengguna dan cap waktu, menciptakan *log* atau jejak rekam yang tak terhapuskan. Mekanisme ini memperkuat **pertanggungjawaban individu** atas data dan keputusan yang diambil, meminimalkan potensi penyalahgunaan atau pengalihan aset untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, akuntabilitas ditingkatkan melalui **Kualitas Laporan** yang dihasilkan. Aplikasi secara otomatis menyusun laporan BMD yang akurat, tepat waktu, dan terstandarisasi sesuai kerangka regulasi (Permendagri dan standar akuntansi). Otomatisasi ini mengurangi *human error* dan kecepatan pelaporan, serta menjamin bahwa data aset yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)—khususnya bagian Neraca—adalah valid. Dengan demikian, aplikasi TI memastikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah didasarkan pada data yang kredibel dan dapat diandalkan.

#### **IMPLIKASI KEBIJAKAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI SIKLUS BARANG DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Meskipun aplikasi teknologi siklus barang daerah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengawasan dan akuntabilitas, efektivitasnya **tidak akan optimal tanpa kebijakan mitigasi** terhadap tantangan implementasi yang ada. Implikasi kebijakan utama berfokus pada dua area kritis: perangkat lunak dan sumber daya manusia (SDM).

**Penyempurnaan Aplikasi** merupakan kebutuhan mendesak; pengembang utama aplikasi (seperti BPKP untuk SIMDA BMD) wajib melakukan *update* dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mengatasi *bug* dan kekurangan fitur yang menghambat akurasi data. Misalnya, masalah teknis yang tampaknya kecil seperti kesulitan dalam meng-*input* bilangan berkoma dapat menyebabkan perbedaan pencatatan yang substansial, merusak akuntabilitas, dan memerlukan intervensi manual yang inefisien. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme umpan balik yang kuat antara pengguna di daerah dan pengembang pusat untuk memastikan aplikasi benar-benar **sesuai dengan kebutuhan operasional** di lapangan.

Selain aspek teknis, **Peningkatan Kompetensi SDM** merupakan prasyarat non-teknis yang sangat penting. Dampak positif teknologi akan tereduksi jika pengguna sistem, seperti Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pembantu, belum memiliki kompetensi yang memadai atau menunjukkan **resistensi terhadap perubahan** dari sistem manual ke digital. Kebijakan harus mendorong **pelatihan berkelanjutan** dan sertifikasi bagi operator sistem. Selain itu, penetapan **Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mendetail, dan tersosialisasi** mengenai penggunaan aplikasi sangat diperlukan. SOP ini berfungsi sebagai panduan baku yang menghilangkan ambiguitas dan *miscommunication* antarpihak terkait, memastikan setiap langkah pengelolaan aset dilakukan secara seragam dan akuntabel. Dengan sinergi antara aplikasi yang handal dan SDM yang kompeten, potensi penuh aplikasi teknologi siklus barang daerah dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat dicapai.

#### D. KESIMPULAN

Penerapan aplikasi teknologi siklus barang daerah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sistem digital yang terintegrasi menggantikan metode manual, sehingga data aset dapat tercatat secara real-time, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait. Hal ini memungkinkan proses pengawasan berjalan lebih cepat, transparan, dan bebas dari risiko human error yang sering terjadi dalam pencatatan konvensional.

Selain itu, sistem ini memperkuat aspek akuntabilitas melalui penerapan audit trail dan pembatasan akses berbasis peran (role-based access control). Setiap aktivitas pengguna terekam dengan jelas, sehingga pertanggungjawaban individu terhadap data dan keputusan dapat ditelusuri dengan mudah. Transparansi pelaporan pun meningkat karena aplikasi



secara otomatis menghasilkan laporan yang sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, menjamin keandalan serta konsistensi data aset daerah.

Agar penerapan teknologi ini berjalan optimal, diperlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan baik dari sisi pengembangan perangkat lunak maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan rutin, penyempurnaan sistem, serta penerapan SOP yang jelas menjadi faktor kunci agar sistem ini benar-benar mampu mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip *Good Governance*.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Afriady, A., & Pangestu, A. B. (2021). Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(1), 46–57.
- Ferdianus. (2013). Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (studi pada pemerintah provinsi maluku). Universitas Gajah Mada.
- Gugun Geusan Akbar, Ikeu Kania, Aceng Ulumudin, Grisna Anggadwita, Lintang Sukma Harmanto, & Dini Turipanam Alamanda. (2019). Innovation in the Public Sector: The effectiveness of" LAPOR!" as one of the Smart City Programs in Bandung. *International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH 2018)*.
- Hidayati, Y. (2016). Pengaruh Siklus Pengelolaan Barang Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Ieke Sartika Iriany, Iis Zilfah Adnan, & Yowan Rachmawati. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 15–20.
- Kania, I. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Garut. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Managemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(2), 1768–1779.
- Maholtra, N. K. (2012). Riset Pemasaran (Marketing Research) (Edisi 4 Jilid 1). PT Indeks.
- Nursasona, D. I. (2017). Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Dalam Rangka Efisiensi Penatausahaan Barang Milik Daerah. *Journal of Management Review*, 11(1), 133 142.

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (2016).
- Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah. *Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah. JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 10(2), 189–197.
- Ramdhani, A., Alamanda, D. T., Nurdiaman, A. M., & Arief, M. (2019). Problem Arising From New Technology on Government, the Use of Hay.U Application in Bandung, Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(2), 149. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i2.1889>
- Ramdhani, A., Alamanda, D. T., Sidiq, F., & Prabowo, A. (2018). The Impact of Taxpayers' Attitude toward the Effectiveness of Land and Building Tax Implementation. *The Journal of Social Sciences Research, SPI4*, 224–226. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi4.224.226>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran* (1st ed.). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.